ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA PARIAMAN TAHUN 2017-2021

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

Lavenia Sabrira

NIM. 19133041

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA PARIAMAN TAHUN 2017-2021

Nama	: Lavenia Sabrira
NIM	: 19133041
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Padang, 28 Juli 2022

Diketahui Oleh,	Disetujui Oleh,
Ketua Prodi	Pembimbing
Halkadri Fitra, SE,MM,Ak,CA	Mia Angelina Setiawan, SE.M.Si
NIP. 198008092010121003	NIP. 198805072014042001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA PARIAMAN TAHUN 2017-2021

Nama	: Lavenia Sabrira
NIM	: 19133041
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 28 Juli 2022

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
1. Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Salma Taqwa, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Ade Elsa Betavia, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lavenia Sabrira
Thn. Masuk/NIM	: 2019/19133041
Tempat/Tgl. Lahir	: Pariaman, 31 Juli 2001
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Keahlian	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jl. R.A Kartini No.01 Kampung Jawa 1 Pariaman
Judul Tugas Akhir	: Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota Pariaman Tahun 2017-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan,

Lavenia Sabrira

NIM. 19133041

ABSTRAK

Lavenia Sabrira : **Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota Pariaman Tahun 2017-2021**

Pembimbing : **Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2017-2021 dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah. Permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Kota Pariaman tahun 2017-2021 adalah pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah, realisasi pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena adanya fenomena wabah virus covid'19 pada tahun 2020.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Pariaman. Data yang diteliti yaitu data realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017-2021, data realisasi pendapatan transfer pusat dan provinsi tahun 2017-2021, data realisasi pinjaman tahun 2017-2021, dan data realisasi pendapatan daerah tahun 2017-2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan analisis (1) Rasio derajat desentralisasi pada Pemerintah Kota Pariaman tahun 2017-2021 memiliki rata-rata sebesar 5,36% dengan skala interval 00,00-10,00% dan masuk ke dalam kriteria "sangat kurang", (2) Rasio kemandirian keuangan daerah pada Kota Pariaman tahun 2017-2021 memiliki rata-rata sebesar 6,30% dengan skala interval 00-25%, sehingga dikategorikan pada daerah dengan kemampuan keuangan "rendah sekali" dan masuk ke dalam pola hubungan "instruktif".

Kata Kunci : Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota Pariaman Tahun 2017-2021**".

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Salallahu 'alaihi Wassalam yang telah memperjuangkan dunia yang dahulunya dari zaman kejahiliaan menjadi dunia yang penuh dengan ilmu Pengetahuan seperti sekarang ini adanya.

Tugas Akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi dalam menyusun Tugas Akhir ini.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Syabri, Ibunda (Almh). Wira Wati, dan adik penulis Farhan Bayu

Rahma Yuda, serta keluarga besar yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE., MM, Ak, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan perbaikan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Orang yang selalu mendengar keluh kesah, memberikan semangat dan motivasi secara materil maupun moril yaitu Dinha Syakbania Tripipo, Resy Oktriza Putri, Intan Amaliya Fitri, dan Dinatul Fadhila.
8. Dan semua teman-teman mahasiswa angkatan 2019 yang telah banyak membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terima kasih.

Pariaman, 28 Juli 2022

Lavenia Sabrira

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Otonomi Daerah 9
B. Desentralisasi Fiskal 10
C. Kemandirian Keuangan Daerah 11
D. Kinerja Keuangan Daerah 12
E. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 13
F. Pengelolaan Keuangan Daerah 14
G. Laporan Keuangan Daerah 15
H. Analisis Kinerja Keuangan Daerah 17
1. Derajat Desentralisasi 18
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN
A. Bentuk Penelitian 22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 22
C. Rancangan Penelitian 22

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan 28
1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman 28
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman 30
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman 31
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman 32

B. Pembahasan 36
1. Analisis Derajat Desentralisasi 36
2. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 48

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2017-2021 4
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal..... 18
Tabel 2.2 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah..... 20
Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal..... 37
Tabel 4.2 Analisis Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2017-2021..... 37
Tabel 4.3 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah..... 42
Tabel 4.4 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017-2021 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman 31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah khususnya dalam hal kemandirian keuangan di banyak daerah khususnya di Indonesia masih belum dapat terselenggara secara optimal. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan akan semakin berkurang.

Otonomi daerah akan tetap bertahan ketika pemerintah daerah masih mampu dalam membiayai dan mengelola daerahnya. Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efesien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama disajikan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019).

Menurut Mahmudi (2019: 90), Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan (Mahmudi, 2016). Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diantaranya yaitu analisis derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2019:140), Derajat desentralisasi merupakan rasio yang menggambarkan derajat kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dengan menghitung rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menggali, mengelola dan mengatur keuangan sendiri sebagai

daerah otonom.

Menurut Mahmudi (2019:140), Rasio kemandirian daerah menjelaskan tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan sumber lainnya seperti bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut. Dengan semakin tingginya rasio kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah dan demikian sebaliknya.

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi rasio kemandirian karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan otonomi daerah. Kota Pariaman memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Kota Pariaman terkenal akan keindahan pantai yang dimilikinya sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi. Sebagai daerah pariwisata, dengan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung akan berpengaruh pada besarnya PAD Kota Pariaman.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah sangat penting sekali dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya.

Keberhasilan suatu daerah terlihat dari penerimaan pendapatan asli daerah yang meningkat disetiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang membaik sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari berapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Berikut ini pendapatan Pemerintah Daerah Kota Pariaman tahun 2017-2021 :

Tabel 1.1
Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi Pinjaman
2017	Rp 639,032,751,955.42	Rp 30,881,846,112.42	Rp 522,676,988,201.00	Rp 22,836,260,931.00	Rp -
2018	Rp 627,169,121,763.69	Rp 32,213,303,036.69	Rp 518,427,165,546.00	Rp 23,176,773,078.00	Rp -
2019	Rp 673,533,272,845.13	Rp 36,665,174,233.13	Rp 549,127,630,742.00	Rp 27,358,673,875.00	Rp -
2020	Rp 632,222,867,998.86	Rp 32,961,765,488.86	Rp 514,303,227,619.00	Rp 23,714,710,059.00	Rp -
2021	Rp 613,252,687,859.97	Rp 38,032,040,569.97	Rp 482,861,091,238.00	Rp 29,399,090,052.00	Rp -

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada Kota Pariaman dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi disetiap tahunnya,

sedangkan dari tahun 2020-2021 realisasi pendapatan daerah dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada Kota Pariaman mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi pada Kota Pariaman dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Namun, pada tahun 2019-2021 realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi pada Kota Pariaman mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2019-2020 terdapat penurunan jumlah yang cukup signifikan, sedangkan dari tahun 2020-2021 realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi pada Kota Pariaman mengalami peningkatan jumlah yang cukup drastis.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena adanya fenomena wabah virus covid'19 pada tahun 2020. Dimana pada tahun tersebut sedang maraknya penyebaran virus covid'19 di Kota Pariaman, sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah Kota Pariaman pada tahun 2020 tersebut.

Dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman, kita hanya dapat melihat atau mengetahui kondisi keuangan suatu Pemerintah Daerah Kota Pariaman disetiap tahunnya. Namun, dari data diatas belum dapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman tahun 2017-2021 dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah, apakah derajat

desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman mengalami peningkatan atau penurunan, masuk kedalam kriteria derajat desentralisasi manakah Pemerintah Kota Pariaman, dan bagaimana kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, serta termasuk ke dalam pola hubungan manakah Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukannya analisis derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah pada Kota Pariaman tahun 2017-2021, yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah yang lebih optimal atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas agar dapat mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Pariaman berdasarkan analisis derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota Pariaman Tahun 2017-2021".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2017-2021 dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2017-2021 berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2017-2021 berdasarkan analisis derajat desentralisasi.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2017-2021 berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Dalam penelitian ini, penulis dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dan menambah pengetahuan dalam analisis laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Pariaman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.